

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Penelitian dengan judul “Pembuatan Keputusan Pemerintah Indonesia untuk Memberikan Bantuan Luar Negeri Kepada Palestina” ini berhasil menemukan alasan pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan luar negeri kepada Palestina. Keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina dihasilkan karena kedua ‘pemain’ yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yaitu Presiden-Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memiliki perbedaan dalam kepentingan. Terlebih lagi, dalam pembuatan keputusan dibutuhkan kekuatan dan kekuasaan dari kedua ‘pemain’. Sehingga perbedaan kepentingan tersebut menghasilkan keputusan yang tidak rasional.

Keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina tidak mencerminkan kepentingan Presiden-Kementerian Luar Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian bantuan luar negeri kepada Palestina tidak mencerminkan kepentingan yang dimiliki Presiden dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam hubungan luar negeri, karena bantuan luar negeri tersebut tidak memberikan kewajiban kepada Palestina untuk melakukan hal yang sama atau dengan kata lain bukan berupa kerjasama atau hutang yang dilengkapi dengan kontrak kewajiban. Kemudian keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina juga tidak

mencerminkan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan mewujudkan kemerdekaan pada Palestina. Memberikan bantuan luar negeri, tidak mendatangkan pengakuan dari negara-negara lain terhadap kemerdekaan Palestina

Lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian: “**Kenapa Pemerintah Indonesia Memutuskan untuk Memberikan Bantuan Luar Negeri Kepada Palestina? (Tahun 2015-2019)**”, terlihat bahwa keputusan tersebut dibuat karena kepentingan yang dimiliki Presiden-Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan kepentingan milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) adalah berbeda. Diperlukan kekuatan politik Presiden-Kementerian Luar Negeri dan DPR dalam membuat keputusan, maka perbedaan kepentingan menghasilkan keputusan yang tidak rasional. Perbedaan kepentingan berujung Presiden-Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan kedua ‘pemain’ yaitu keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina. Keputusan tersebut adalah keputusan yang dibuat diantara kepentingan dua pihak yang berbeda.

Penelitian ini menekankan bahwa setiap aksi atau keputusan dari suatu pemerintahan adalah dibuat melalui beberapa institusi atau personil pemerintah sebagai bentuk **pemaknaan**. Walaupun setiap institusi memiliki fungsi dan kekuasaannya masing-masing, namun dalam proses politik pembuatan keputusan tentunya keterlibatan dengan satu sama lain tidak dapat dihindari. Penelitian ini juga bermaksud untuk menghasilkan **pemaknaan** bahwa setiap institusi dibawah satu pemerintahan yang sama bukan berarti memiliki kepentingan yang sama, melainkan dengan

kepentingan yang berbeda-beda. Namun tentunya kepentingan yang berbeda antara setiap institusi bukan berarti tidak berorientasi pada kemajuan negara, melainkan setiap institusi memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Tentunya penelitian ini bukan tanpa kekurangan, dan terdapat sejumlah batasan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji proses pembuatan keputusan pemerintah Indonesia pada skala pembagian kekuasaan dalam pemerintah Indonesia. Dimana Presiden dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai lembaga negara dengan kekuasaan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara dengan kekuasaan legislatif. Tentunya proses pembuatan keputusan juga dapat dianalisa menggunakan teori politik birkorasi berdasarkan setiap lembaga negara yang berada dibawah pembagian kekuasaan eksekutif dan eksekutif. Namun karena keterbatasan dan kekurangan penulis, lembaga negara yang dijadikan objek analisis adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan tertinggi dalam setiap pembagian kekuasaan di pemerintah Indonesia. Maka dari itu besar harapan penulis, agar penelitian ini dapat dikembangkan dan dikaji untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Allison, Graham T. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. The SHAFR Guide Online, 1971.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*. California: Sage Publications, 2009.

Hudson, Valerie M. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishing Group, 2020.

Mayer, Wolfgang dan Pascalias Raimondos, "The Politics of Foreign Aid", EPRU Working Paper Series, 1999.

Morin, Jean- Frédéric dan Jonathan Paquin. *Foreign Policy Analysis*, 2018.

### Artikel Jurnal

Alesina, Alberto dan David Dollar, "Who Gives Foreign to Whom and Why," *Journal of Economic Growth* Vol. 5 No.1 (Maret 2000),  
<https://www.jstor.org/stable/40216022>

Hattori, Tomohisa. "Reconceptualizing Foreign Aid." *Review of International Political Economy* 8, no. 4 (2001): 633-660.

Maujana S, Hendra. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 133.

Norcross, Luke. "Almost Perfect: The Bureaucratic Politics Model and U.S Foreign Policy," *E-International Relation*

## **Dokumen Resmi Pemerintah/Lembaga**

JDH BPK RI. *UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*, 1999.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019*, 2015.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*, 2020.

## **Website**

Aminah, Andi N. "Indonesia Beri Bantuan 1 Juta Dolar as Untuk Palestina." *Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/pnx9kd384/indonesia-beri-bantuan-1-juta-dolar-as-untuk-palestina>.

"Fokus BKSAP." *Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)*. Diakses 27 November 2021, <http://ksap.dpr.go.id/fokus/kemanusiaan>.

"Foreign Aid." *Encyclopædia Britannica*. Diakses 10 Oktober 2021. <https://www.britannica.com/topic/foreign-aid>.

"Fungsi Kementerian Luar Negeri: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Diakses 25 November 2021.

Gumelar, Galih. "Jokowi Bebaskan Bea Masuk Impor Barang Dari Palestina." *CNN Indonesia*. 4 Januari 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180104190259-92-266791/jokowi-bebaskan-bea-masuk-impor-barang-dari-palestina>.

"Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Dewan Perwakilan Rakyat*.

Diakses November 25 2021. <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>

“Independence Remains an Elusive Dream for Palestinians.” Anadolu Agency. Diakses 25 Maret 2021. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/independence-remains-an-elusive-dream-for-palestinians/1646238>.

“Indonesia-Palestina.” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Diakses 12 November 2021. <https://kemlu.go.id/amman/id/pages/indonesia-palestine/2415/etc-menu>

“Indonesia: Pembebasan Bea Masuk 61 Komoditas Palestina Melalui PTA.” Anadolu Agency, Diakses 21 November 2021. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/indonesia-pembebasan-bea-masuk-61-komoditas-palestina-melalui-pta/1539832>.

“Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Amman, Merangkap Negara Palestina Kerajaan Yordania Hasyimah.” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Diakses 25 Maret 2021. <https://kemlu.go.id/amman/id/pages/indonesia-palestine/2415/etc-menu>.

Natalia, Ester C. “Indonesia Salurkan Bantuan Dana RP 28,4 Miliar Ke Palestina.” *CNBC Indonesia*. 27 Juni 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180627170712-4-20758/indonesia-salurkan-bantuan-dana-rp-284-miliar-ke-palestina>.

“Tentang BKSAP.” *Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)*, Diakses 27 November 2021. <http://ksap.dpr.go.id/index/tentang>.  
Tim. “Indonesia Beri Bantuan RP106,2 Miliar Bagi Palestina.” CNN internasional, 16 Oktober, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181016155919-106-338917/indonesia-beri-bantuan-rp1062-miliar-bagi-palestina>

“What We Do Unrwa.” UNRWA, Diakses 22 November 2021. <https://www.unrwa.org/what-we-do>.